

TRANSFORMASI SDM UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SIPKD DIMEDIASI IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

*Transformation of Human Resources to Improve the Performance of SIPKD Mediated
by the Implementation of Accrual-Based SAP in Jambi Province Regional Equipment
Organizations*

Asrini^{1*}, Amri Amir², Sri Rahayu³, Achmad Hizazi⁴

¹Program Doktoral Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. JL. A.H. Manaf, Telanaipura Jambi, Jambi, Indonesia. Email: ¹asrini.msa@unjambi.ac.id.

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. JL. A.H. Manaf, Telanaipura Jambi, Jambi, Indonesia. Email: ²amri_amir@unja.ac.id, ³srijambi@gmail.com, ⁴hizazi@gmail.com.

Diterima : 8 Maret 2023; Direvisi : 17 Maret 2023; Disetujui : 30 Maret 2023
<https://doi.org/10.37250/newkiki.v41.189>

Abstract

The research objective is to explain the direct and indirect effects of the effectiveness of Human Resources (HR) on the performance of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) through the implementation of accrual-based SAP. The phenomenon of readiness of the Human Resources of local government organizations is an important issue related to SIPKD Performance and the application of accrual-based Local Government Accounting Standards in reporting the accountability of local government entities in implementing development programs and public services. A quantitative research approach, using primary data from 80 respondents, with purposive sampling. The results of the direct analysis of HR effectiveness affecting SIPKD performance are not proven and rejected, meaning that SIPKD performance remains good if HR effectiveness does not support it. But in the third hypothesis, it is proven that the role of full mediation shows that HR effectiveness does not show SIPKD performance if it is not mediated by the implementation of accrual-based SAP. Recommendations for strategic decision makers to improve SIPKD performance must have human resources with the ability, education, and skills to implement accrual-based SAP. Future research explores the antecedents of policy, internal control, and communication on the implementation of accrual-based SAP and the performance of the Regional Financial Management Information System (SIPKD).

Keywords: HR effectiveness, SIPKD, Accrual SAP

Abstrak

Tujuan penelitian menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) melalui implementasi SAP berbasis akrual. Fenomena kesiapan Sumberdaya Manusia organisasi pemerintah daerah menjadi isu penting terkait Kinerja SIPKD dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual dalam pelaporan pertanggung jawaban entitas pemerintah daerah dalam penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik Pendekatan penelitian kuantitatif, menggunakan data primer dari 80 responden, dengan *purposive sampling*. Hasil analisa secara langsung efektivitas SDM mempengaruhi kinerja SIPKD tidak terbukti dan ditolak, artinya kinerja SIPKD tetap baik jika efektivitas SDM tidak mendukung. Tetapi pada hipotesis ketiga terbukti peran full mediasi menunjukkan bahwa efektivitas SDM tidak menunjukkan kinerja SIPKD apabila tidak dimediasi oleh implementasi SAP berbasis akrual. Rekomendasi bagi pembuat keputusan strategik untuk meningkatkan kinerja SIPKD harus memiliki SDM dengan kemampuan, pendidikan, dan kemahiran mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Penelitian mendatang mengeksplorasi anteseden kebijakan, pengendalian internal, komunikasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Kata Kunci: Efektivitas SDM, SIPKD, SAP Akrual

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting bagi setiap organisasi profit atau non-profit. Efektivitas sumberdaya manusia kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Terkait dengan efektivitas SDM dalam organisasi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik saat ini menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan untuk mewujudkan *good and clean governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

Kinerja sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPK) menjadi tuntutan bagi setiap entitas pemerintah daerah. Karena kinerja tersebut erat dengan keberhasilan melaporkan keuangan APBN yang digunakan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Kinerja SIPKD dipengaruhi banyak factor dan menjadi perdebatan dalam perilaku akuntansi publik. Secara empiris beberapa temuan membuktikan bahwa efektivitas Sumber Daya Manusia mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019). Hasil analisa (Kurniawan & Yuswanto, 2016) menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SAP akrual mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Wiryaningsih et al., 2017)

menemukan bahwa Sumber Daya Manusia disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peranan penting dalam menyediakan data, mengolah, menginput dan memberikan laporan atau informasi secara lengkap dan benar. Tetapi, temuan ini tidak terbukti atau kontradiktif dengan hasil analisa (Sa'diyah & Yuhertiana, 2021) bahwa SDM tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja SIPD, yang menjadi factor penting yaitu kebijakan Pemerintah untuk mengimplementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. artinya kelemahannya pada efektivitas SDM dalam membuat laporan keuangan berbasis akrual sehingga mempengaruhi kinerja sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan isu dalam perilaku akuntansi terkait kebijakan pemerintah PP No. 71 tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh harus diterapkan pada tahun anggaran 2015. Artinya bahwa kebijakan implementasi SAP akrual harus dipahami dan dilaksanakan SDM terkait, sehingga berdampak pada kinerja SIPD. Berdasarkan fenomena empiris terlihat dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan daerah di Indonesia masih perlu dibenahi agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel

(BPK, 2013). Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Jambi. Tetapi, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak tertib setiap tahun. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan: (1) Sistem Pengendalian Intern (2) Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (3) Tidak tertibnya penatausahaan kas (4) Tidak tertibnya pengelolaan dan penatausahaan aset tetap (5) Kekurangan volume pekerjaan fisik (6) Penganggaran dan manajemen kas yang tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta (7) Penatausahaan investasi nonpermanen yang belum sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir. , artinya kelemahannya pada efektifitas SDM dalam membuat laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil pembuktian hipotesis (Sa'diyah & Yuhertiana, 2021) bahwa efektivitas Sumber Daya Manusia terlibat tidak langsung signifikan mempengaruhi kinerja system pengelolaan keuangan daerah menunjukkan besarnya peran tidak implementasi SAP berbasis akrual.

Terkait efektivitas SDM memiliki kemampuan menjelaskan kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah jika SDM atau pengguna

memiliki kemampuan menggunakan SAP berbasis Akrual (Rama, 2019; Evicahyani & Setiawina.,2016; (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019) harus terukur. Pengukuran variabel Efektivitas Sumber Daya Manusia menggunakan empat indikator Keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, kemampuan intelektual (Syarienda et al., 2019).

Peran Sumbledaya Manusia dalam berkembangnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan juga kinerja pemerintah daerah menuntut pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan dengan menggunakan basis akuntansi akrual. Penerapan basis akrual dapat diterapkan secara optimal dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kompetensi memadai agar penyajian laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi pun sangat menunjang terlaksananya basis akuntansi akrual yang optimal untuk menangani peningkatan jumlah transaksi yang besar. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa SDM sangat berperan penting dalam keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual.

Isu terkait reformasi akuntansi di Indonesia yang melakukan banyak perubahan di bidang keuangan dengan

memunculkan tiga paket Undang-undang yang telah menjadi dasar pengelolaan keuangan negara sudah mencapai satu dekade. Kemudian pemerintah mengeluarkan Kembali PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintahan atau yang sering disebut SAP. Perubahan ini tidak mudah dilaksanakan secara cepat, butuh persiapan dan pemahaman yang baik sebelum dapat mengimplementasikan agar pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, berkualitas, dan akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kesiapan dan keberhasilan penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang baru ini. Sumber daya manusia, perangkat pendukung, serta komitmen organisasi dinyatakan berpengaruh positif dan memiliki peranan besar terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan akuntansi berbasis akrual walaupun masih memiliki keterbatasan pemahaman maupun kesiapan Sumberdaya Manusia terkait implementasi SAP berbasis akrual dan system informasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena, isu dan kontradiksi hasil empiris, maka perlu

adanya kedalam analisa terkait pengaruh SDM melalui implemantasi SAP berbasis akrual. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bagaimana pengaruh langsung efektivitas Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi SAP-Berbasis Akrual dan Kinerja Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). (2) Peran mediasi Implementasi SAP-Berbasis Akrual terhadap Sumber Daya Manusia dan Kinerja Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Jambi.

LANDASAN TEORI **Teori Pengelolaan (Stewardship Theory)**

Teori *stewardship* merupakan teori yang memberikan suatu pandangan dalam perilaku akuntansi terkait motivasi individu mencapai tujuan organisasi sektor public. Kepentingan organisasi menjadi tujuan utama daripada tujuan individu. Sehingga teori ini mengemukakan hubungan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Wahida, 2015).

Konsep *Stewardship Theory* dirancang khusus untuk memberikan gambaran psikologi dan sosiologi para manajerial untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah (Sanjaya, 2017). Menurut (Jefri, 2018) teori *stewardship*

memiliki fungsi dalam control, evaluasi, audit dan pelaporan dalam aspek pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk terwujudnya tujuan organisasi (Jefri, 2018).

Teori *Stewardship* menunjukkan suatu situasi ketika manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan *principal*. Konseptual teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa umumnya manusia memiliki kemampuan untuk melakukan Tindakan yang bertanggungjawab, jujur, dapat dipercaya, memiliki integritas. Sehingga secara teori *Stewardship* tersebut dapat mencerminkan berjalannya manajemen suatu organisasi secara benar dan baik, dimana sumberdaya manusia yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan bisa dikatakan *good steward* karena melakukan tugas secara penuh tanggung jawab.

Sistem Akuntansi Pemerintah-Berbasis Akrua

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP Berbasis Akrua merupakan kebijakan terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aspek penting yang menjadi konsen dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrua yaitu pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas. Menurut Purwita (2013), Setiap entitas pemerintah daerah yang menyelenggarakan pembangunan daerah dan pelayanan menggunakan Anggaran dan Belanja bersumber dari negara maupun pemerintah daerah harus dilaporkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Sehingga setiap entitas pemerintah daerah wajib melaksanakan penerapan SAP dengan pemahaman yang sama tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Alasan pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrua, yaitu (a) Regulasi, (b) Sistem dan sarana pendukung, (c) Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah dalam mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pemahaman ini maka pengaturan pengelolaan keuangan daerah terkait

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menindaklunjukkannya menggunakan peraturan daerah.

Menurut (Dollah & Manossoh, 2017) dari aspek peraturan implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah harus memuat unsur 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam pertanggungjawaban APBN/APBD oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan bagian penting dalam teknologi informasi manajemen yang dibuat untuk membantu pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Software ini kebijakan pemerintah mengontrol kegiatan daerah yang menggunakan anggaran negara dan daerah. Seluaruh target dan realisasi kegiatan pembangunan di input dalam aplikasi SIPKD secara terpadu. Kinerja SIPKD dapat diidentifikasi dari efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dalam menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan

Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010, Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di buat sebagai penguatan persamaan persepsi dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tentang penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki output berupa kinerja pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur, tepat waktu untuk Penyusunan/Penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.

Konsep Efektivitas Sumberdaya Manusia

Efektivitas Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan sistem akuntansi yang memiliki standar nasional dan mengaplikasikan pelaporan menggunakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan. (Firdau, 2018) mengeksplorasi dampak Sumber Daya Manusia terhadap laporan keuangan pemerintah menggunakan indikator latar belakang pendidikan, pengalaman dan pelatihan. (Erawati & Kurniawan, 2018a) mengemukakan pengertian efektifitas SDM yaitu optimalisasi dan pengembangan pengelolaan SDM

sebagai sumberdaya penting dalam organisasi yang dapat diukur dari kuantitas (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Selanjutnya efektifitas SDM diarahkan pada pembentukan *talent pool* terkait pengelolaan SDM dalam pemanfaatan dan peningkatan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta mengembangkan *best practice sharing* untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual dan system informasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun efektifitas SDM dapat dilakukan dengan melakukan strategi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* (*Learning and Growth / LG 1*).
- (2) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan sarana prasarana yang telah dibentuk dalam good governance Efektivitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.
- (3) Menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional (*Learning and Growth*).
- (4) Mengembangkan pelaksanaan dan meningkatkan pebelajaran serta

pengetahuan SDM terkait perubahan lingkungan maupun organisasi.

- (5) Penentuan proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) untuk mendukung *efektivitas* sumber daya manusia.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep hubungan efektifitas SDM terhadap Kinerja SIPD (Leif Appelgren, 2020; Anthony et al, 2020; Kharisma, 2017) membuktikan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan Kinerja SIPKD. Peran mediasi implementasi SAP berbasis akrual berpengaruh positif antara efektifitas SDM dan Kinerja SIPKD. Maka rumusan hipotesis ini terdapat pengaruh langsung signifikan positif SDM terhadap Implementasi SAP berbasis akrual dan secara tidak langsung full memediasi hubungan efektivitas SDM dengan kinerja SIPKD (Dollah & Manossoh, 2017; Suryaningrat & Utama, 2018). Maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H₁: Efektivitas Sumber Daya Manusia (X) signifikan dan positif mempengaruhi Implementasi SAP-Berbasis Akrual (Y₁).

H₂: Efektivitas Sumber Daya Manusia (X) signifikan dan positif mempengaruhi Kinerja Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_2).

H₃. Implementasi SAP-Berbasis Akrua (Y_1) positif signifikan mempengaruhi efektivitas SDM (X_1) dan Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y_2).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Rancangan penelitian (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif bersifat *causality* antar variabel melalui menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis (*hypotheses testing*) yang spesifik dan konklusif (Malhotra, 1999; Creswell, 2010).

Populasi dan Sampel Penelitian

Pengertian populasi Menurut Sugiyono (2017: 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini yaitu 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 14 Badan dan 8 Biro di Provinsi Jambi (<http://jambiprov.go.id>). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penetapan jumlah sampel (*sample size*) dan derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi, presisi yang dikehendaki dari penelitian, rencana analisa, tenaga, biaya dan waktu (Erawati & Kurniawan, 2018). Penelitian ini menggunakan *teknik purposive*

karakteristik responden yang menjadi sample penelitian yaitu jumlah responden sebanyak 80 orang yang memiliki kriteria sebagai kepala OPD, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Anggaran (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran atau kuasa umum bendahara pada 20 OPD Provinsi Jambi ($20 \times 4 = 80$ responden).

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data subjek yang menunjukkan opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden yang diperoleh dari sumber penelitian langsung dan tidak langsung yaitu jenis data primer dan data sekunder (Lestari & Dewi, 2020) (Sumaryanto et al., 2019).

Sumber data penelitian menggunakan kuesioner yang diadopsi dari kuesioner penelitian (Yuliana, 2018; Lestari & Dewi, 2020; Sayuti et al., 2018; (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019), yang meliputi (1) biografi responden; (2) Content/isi: pernyataan tentang efektivitas Sumber Daya Manusia, implementasi SAP-berbasis Akrua dan Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pengumpulan data primer dengan instrumen berupa kuisisioner setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya

serta diukur menggunakan skala interval 4 point (skala Likert) dengan 4 Sd 1 (5=Selalu), (4=Pernah), (3=Sering), (2= Kadang-kadang) dan (1=Tidak Pernah) (Suliyanto, 2011).

Metode analisa data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) *Software SmartPLS* untuk analisa kausal-prediktif (*causal-predictive analysis*) yang rumit guna menjelaskan ada atau tidak hubungan antara variabel laten. Model akan diuji melalui dua tahap yaitu:

- 1) *Outer Model*//Model Pengukuran adalah penilaian terhadap hubungan antara indikator dengan variabel latennya yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*;
- 2) *Inner Model*//Model Struktural yaitu penilaian terhadap hubungan antar variabel laten dan evaluasi mode struktural dilakukan dengan melihat uji t dengan menggunakan metode *bootstrapping* serta nilai *R-Squares* dan *Q-Squares*. Pengujian efek langsung dilihat dari *path coefficient* sedangkan untuk mengetahui peran variabel intervening atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari *indirect effect* yang langsung dihasilkan oleh PLS. operasional variabel penelitian efektivitas Sumber Daya Manusia

(X_3) adalah SDM yang memiliki kemampuan logika akuntansi dengan baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Stanadar Akuntansi (Rama, 2019; Evicahyani & Setiawina.,2016; Syarienda et al., 2019; Kharisma, 2017; (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019);(Yeni et al., 2020). Variabel ini diukur dengan empat indikator: X_1 Kemampuan Intelektual; X_2 Pengalaman dan X_3 Terampil.

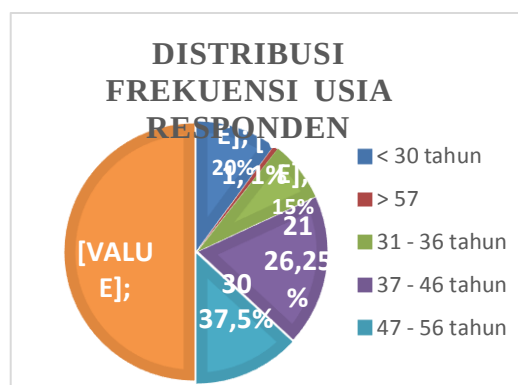
Definisi operasional implementasi SAP-Berbasis Akruar yaitu prinsip-prinsip akuntansi sebagaimana tercantum dalam PP No.71 tahun 2010 dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menggunakan 3 indikator, yaitu $Y_{1.1}$ pemenuhan proses akuntansi (*core job*); $Y_{1.2}$ kepatuhan penerapan kebijakan SAP-akruar; $Y_{1.3}$ Pemenuhan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan. (Jesica Prastiwi & Mimba, 2018; Sayuti et al., 2018; (Yeni et al., 2020);(Lestari & Dewi, 2020); (Yanti et al., 2020).

Definisi operasional variabel Kinerja Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) adalah pemenuhan informasi keuangan yang mempunyai kualitas informasi dan bermanfaat bagi pemakai (*users*) dalam pengambilan keputusan dengan empat (4) indikator,

yaitu: Y_{2.1} Manfaat informasi untuk akuntabilitas; Y_{2.2} Manfaat informasi untuk *Stewardship*; Y_{2.3} manfaat informasi untuk manajerial; Y_{2.4} Manfaat informasi untuk pengawasasn eksternal (Rachmawati, 2018; (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019); Nadir, R., & Hasyim., 2017; Kharisma, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

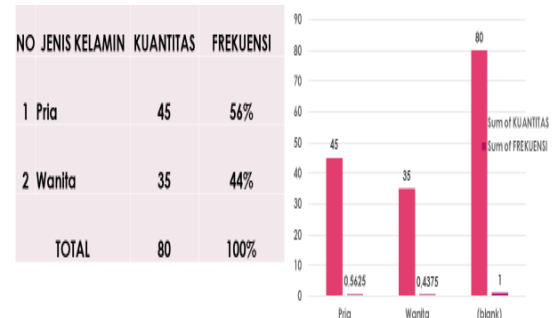
Berikut gambaran hasil analisa dan penyajian dalam bentuk tabel maupun gambar terkait mengisi kuisioner terkait instrumen yang membangun model reflektif dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Sumber: Data Primer (diolah, 2023)

Gambar 1. Deskripsi Usia Responden

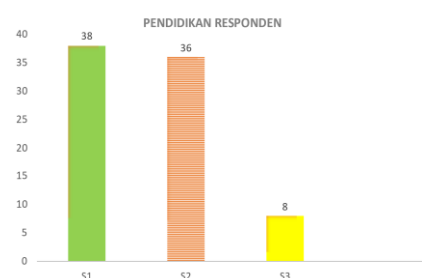
Berdasarkan hasil analisa deskripsi demografi responden pada penelitian ini pada gambar 1 memberikan gambaran bahwa responden berusia 47-56 tahun hamper 38%. Berikut gambaran demografi responden dari aspek gender, hasil analisa dapat disajikan berikut ini:



Sumber: Data Primer (diolah, 2023)

Gambar 2. Deskripsi Gender Responden

Berdasarkan hasil analisa deskriptif, menunjukkna bahwa dominasi pria lebih tinggi dibandingkan wanita yang bertugas dibagian perencanaan dan keuangan pada OPD provinsi Jambi. Hasil analisa ini membuktikan bahwa 56% responden adalah Pria, sedangkan Wanita hanya 12%. Responden penelitian memiliki kategori Pendidikan formal Sarjana (S1), Master (S2) dan Doktoral (S3). Hasil Analisa dapat di lihat pada gragik histogram dibawah ini.



Sumber: Data primer (2023)

Gambar 3 : Deskripsi Pendidikan Responden

Gambaran responden berdasarkan Pendidikan formal mayoritas responden berpendidikan

Sarjana (S1) sebesar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa pada bagian perencanaan, pengelolaan dan keuangan daerah sudah menuju master (S2) karena tidak ada perbedaan yang cukup besar antara pegawai dengan Pendidikan Sarjana. Artinya, dari aspek pendidikan akademik diatas rata-rata. Hal ini dapat menjadi tolak ukur sumberdaya manusia dibidang ini memiliki kemampuan analitis, dan kemampuan teknis yang kredibel terkait penggunaan SAP dan SIPKD. Pada penelitian ini responden dengan Pendidikan master (S2) rata-rata menjabat sebagai kepala dinas dan kepala bidang (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA).

Hasil Uji Hipotesis

Pada tahapan ini nilai γ , β dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program Smart PLS. Pertama, estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*). Kedua, menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan Ketiga menghasilkan estimasi means dan parameter lokasi (konstanta) Hasil analisa penelitian ini menunjukkan tahap estimasi meliputi: *Weight*, *Koefisien Jalur*, dan *Outer Loading* dilakukan

dengan baik dan nilai perhitungan lebih dari 0,5 untuk semua estimasi. (Ghozali, 2016; Hair, et al., 2021).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Inner Model Struktural

	R Square	R ² Adjusted	AVE	GoF	Keputusan
ISAP (Y ₁)	0,846	0,835	0,834	0,875	Kuat dan Baik
SIPKD (Y ₂)	0,184	0,117	0,751		

Sumber: Data Primer (diolah, 2023).

Penilaian *goodness of fit* dapat diketahui dari nilai *Q-Square*. Nilai *Q-Square* memiliki arti yang sama dengan *coffident determination (R-Square)*. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1-R_1^2) (1- R_2^2) \\
 &= 1- (1-0,846) \times (1-0,184) \\
 &= 1 - (0,154 \times 0,816) \\
 &= 1- 0,125 \\
 &= 0,875
 \end{aligned}$$

Hasil pengujian untuk menganalisa *Direct effects* adalah pengaruh langsung dari sebuah konstruk atau variabel *latent exogent* terhadap variabel *latent endogen*, pengaruh efektivitas SDM terhadap Kinerja SIPKD (Y₂) melalui Implementasi SAP berbasis Akrua (Y₁).

Tabel 2. Hasil Uji PLS Bootstrapping Uji Direct Effect

Path Coefficients	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	ISAP (Y ₁)	SIPKD (Y ₂)
ESDM (X ₃) -> ISAP (Y ₁)	-0,154	-0,132	0,226	0,684	0,494	-0,154	-0,697
ESDM (X ₃) ->	-0,697	-0,666	0,582	1,198	0,232		

SIPKD (Y ₂)							
ISAP (Y ₁) -> SIPKD (Y ₂)	0,316	0,315	0,257	1,229	0,220		0,316

Sumber: Data Primer (2023).

Tabel 2 memuat informasi hasil Analisa PLS Algorithm dan PLS *Bostsrapping* menunjukkan bahwa secara langsung variabel ESDM (X₃) memiliki pengaruh negatif sebesar -0,154 terhadap Implementasi SAP berbasis akrual (Y₁) dan terhadap SIPKD (Y₂) -0,697; Implementasi SAP berbasis Akrual terhadap kinerja SIPKD sebesar 0,316. Artinya bahwa secara langsung efektivitas SDM tidak memiliki kontribusi penting dalam kinerja SIPKD. Jika dilihat SDM dalam mempengaruhi Implementasi SAP berbasis akrual memberikan pemahaman bahwa efektivitas SDM tidak mampu menjelaskan secara empiris bahwa pengalaman, kecerdasan dan terampil tidaklah cukup menunjukkan kinerja SIPKD

Tabel 3. Hasil Uji Indirect Effect dan Total Indirect Effect

Specific Indirect Effects (variable mediasi /Y ₁)	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Kesimpulan
ESDM (X) -> ISAP (Y ₁) -> SIPKD (Y ₂)	-0,049	-0,013	0,090	0,540	0,589	Full Mediasi (-)
ESDM (X) -> ISAP (Y ₁)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Sign (+)
ESDM (X) -> SIPKD (Y ₂)	-0,049	-0,013	0,090	0,540	0,589	Indirect (-)
ISAP (Y ₁) -> SIPKD (Y ₂)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Sign (+)

Sumber: Data Primer (diolah, 2023)

Berikut ilustrasi hubungan *indirect* antar variabel penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaruh tidak langsung Efektivitas SDM (X) terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y₂) melalui Implementasi SAP berbasis Akrual (Y₁) adalah sebesar 0,589 yang artinya jika X meningkat satu satuan unit maka Y₂ dapat meningkat secara tidak langsung melalui Y sebesar 58,9%, dan berpengaruh Full Mediasi.

Pembahasan:

Berdasarkan hasil uji untuk model struktural yaitu seperti (1) R

Square pada konstruk endogen. Nilai R Square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin (1998), nilai R square sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah); (2) *Estimate for Path Coefficients*, merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten dengan prosedur *Bootrapping*; (3) *Effect Size (F Square)*, analisis untuk mengetahui kebaikan model; (4) *Prediction relevance (Q square)* atau Stone-Geisser's, untuk mengetahui kapabilitas prediksi

dengan prosedur *blinifolding*. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar).

Langkah kedua adalah mengevaluasi nilai R_2 . Interpretasi nilai R_2 sama dengan interpretasi R_2 regresi linear, yaitu besarnya *variability* variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Menurut Chin (1998) kriteria R_2 terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu: nilai R_2 0.67, 0.33 dan 0.19 sebagai substansial, sedang (*moderate*) dan lemah (*weak*). Perubahan nilai R_2 dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen memiliki pengaruh yang substantif. Hal ini dapat diukur dengan *effect size* f_2 . (Hair, et al., 2021) mengatakan bahwa Effect Size f_2 yang disarankan adalah 0.02, 0.15 dan 0.35 dengan variabel laten eksogen memiliki pengaruh kecil, moderat dan besar pada *level structural*.

Berdasarkan hasil Analisa *bootstrapping* maka validasi model struktural secara keseluruhan digunakan *Goodness of Fit* (GoF). GoF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Nilai GoF ini diperoleh dari akar kuadrat dari *average communalities index* dikalikan dengan

nilai rata-rata R_2 . Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai: 0.1 (GoF kecil), 0,25 (*GoF moderate*), dan 0.36 (GoF besar).

Berdasarkan hasil Analisa pengaruh Langsung Efektivitas Sumber Daya Manusia (X) tidak signifikan dan Negatif mempengaruhi Implementasi SAP-Berbasis Akrua (Y) dan SIPKD (Y_2). Pengaruh langsung efektivitas Sumber Daya Manusia terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap SAP akrua dan kinerja SIPKD menunjukkan bahwa setiap penurunan efektivitas SDM akan memberikan dampak negative terhadap implementasi SAP berbasis Akrua dan Kinerja SIPKD pada setiap OPD di provinsi Jambi. Artinya bahwa efektivitas SDM yang dilihat dari intelektual, pengalaman dan terampil dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan tugas pembangunan daerah dan pelayanan publik (Dollah & Manossoh, 2017) dan Kinerja SIPKD (Suryaningrat & Utama, 2018); Kharisma, 2017); (Leif Appelgren, 2020; Anthony et al, 2020). Hasil Analisa menunjukkan implementasi SAP berbasis akrua dan Kinerja SIPKD pada OPD provinsi jambi dari aspek Sumber daya manusia menunjukkan tidak efektif apabila dilihat dari tingkat intelektual, pengalaman, dan terampil. Artinya bahwa SDM yang berkualitas dan

berkompeten dalam bidang akuntansi dan SIPKD merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bertanggungjawab dan bertugas terkait hal tersebut.

Apabila sumber daya manusia atau pegawai pengelola laporan keuangan memiliki yang baik terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, maka dipastikan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun indikator variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penelitian ini merujuk pada instrumen penelitian Sihasale (2017) yaitu: a) pemahaman tentang Neraca, b) Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, c) Laporan Arus Kas, d) CaLK, e) Penilaian Persediaan, f) Pengakuan Investasi, g) Pengakuan Aset Tetap, h) Konstruksi Dalam Pekerjaan, i) Kewajiban dan Koreksi Atas Kesalahan, j) Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Sejalan dengan temuan (Sa'diyah & Yuhertiana, 2021) bahwa hambatan dalam implementasi SAP berbasis AkruaL dan SIPKD paling besar adalah kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai belum terpenuhi. Selain itu, efektivitas SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja

SIPKD, dimana intelektual, pengalaman dan terampil SDM dalam penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan.

Sedangkan pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaL signifikan dan positif Terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL signifikan mempengaruhi kinerja sistem informasi daerah berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa Penerapan SAP berbasis akruaL memiliki pengaruh besar meningkatkan kinerja SIPKD. Keselarasan SAP berbasis akruaL dengan SIPKD yang didukung dengan efektivitas SDM akan melahirkan informasi yang akurat, akuntabel dan benar. Berdasarkan *Stewardship Theory* merupakan komplementer penjelasan terkait akuntansi keperilakuan yang percaya bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus pada tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (John & Alastair, 2019; Wahida, 2015). (Gumelar & Dinnur, 2020) bahwa upaya meninjau aspek informasi akuntansi dari aspek komponen-komponen laporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan.

Konsep teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yaitu relevan, kehandalan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Leif, 2020; (Lestari & Dewi, 2020).

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh Full Mediasi antara efektifitas SDM dimediasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
2. Terdapat pengaruh langsung positif signifikan implementasi SAP berbasis AkruaI terhadap kinerja SIPKD apabila tidak ada Implementasikan SAP berbasis AkruaI.
3. Pengaruh langsung efektifitas SDM terhadap Kinerja SIPKD tidak terbukti.
4. Untuk penelitian akan datang mengembangkan model konseptual dengan menambahkan variabel yang lain seperti regulasi, pengendalian internal.

Saran Praktis

- (1)Bagi Pemerintah Daerah harus menerapkan SAP berbasis AkruaI berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 secara full untuk penggunaan APBN maupun APBD bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

(2)Setiap OPD harus memiliki kesiapan Sumberdaya Manusia khususnya bidang perencanaan dan keuangan daerah.

- (3)Pemerintah Daerah harus mensosialisasikan SAP berbasis akruaI dan system informasi pengelolaan keuangan daerah secara intens.

References

- BPK, I. (2013). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Aproach To Structural Equation Modeling. *Modern Methods For Business Research*, 295-336.
- Dollah, K. S., & Manossoh, H. (2017). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. . *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), , 256–265.
- Eka Yustikarana, P. B., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Kemampuan Dan Keterlibatan Pengguna Terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. . *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I03.P13>, 11983–12009.
- Ghozali. (2016). *Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Risher, J. J., & Ringle, C. M. (2018). When To Use And How To Report The Results Of Pls-Sem. 31(1),. <https://doi.org/10.1108/Ebr-11-2018-0203>, 2–24.
- Hair, J., Hult, G., Ringle, C., Sarstedt, M., Danks, N., & Ray, S. (2021). *An Introduction To Structural Equation*

- Modeling. In: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) Using R. Classroom Companion: Business.* Cham. Ht: Springer.
- Hasanah, Y. .. (2019). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi ,Penerapan Sistemakuntansi ,Penerapan Sistem Akuntansi ,Penerapan Sistem Pemerintahan Terhadap Kualitaslaporan Keuangan Pemerinatahdaerah (Studi Pada Skpd Dipemerintah Kabupaten Sukoharjo).* Purworejo: University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah.
- Henseller, J., Ringle, C., & Sinkovics. (2009). The Use Of Partial Least Squares Path Modeling In International Marketing. *Advances In International Marketing* (20)., 277-319.
- Kurniawan, Y., & Yuswanto. (2016). Pengembangan Program Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap). *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (Janapati)*, 40-48.
- Maulana, Y. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship. Vol.10, No . 2 , 1 4 9 - 1 6 0.*
- Nottea, A. L., & Rhodes, C. (2020). The Theoretical Frameworks Behind Integrated Environmental, Ecosystem, And Economic Accounting Systems And Their Classifications. *Environmental Impact Assessment Review.*
- Nurhasniwati, Mukhzarudfa, & Ap, E. D. (2020). Determinants Of Accrual Based Government Accounting Standards (Sap): Study At The Regional Financial And Asset Management Agency (Bpkad) Of Jambi City And Tanjung Jabung Barat Regency. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 145-157.
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information On Indonesian Umkm Taxes. *Journal Of Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 447–454.
- Rahim, S. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. (2017). Internal Control Weaknesses In A Cooperative Body: Malaysian Experience. . *Int. J. Management Practice*, 10(2), 131-151.
- Sa'diyah, D. I., & Yuhertiana, I. .. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Insentif Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua(Studi Pada Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 14, No. 1, 126 - 141.
- Sarstedt, M., & Cheah, J. H. (2019). Partial Least Squares Structural Equation Modeling Using Smartpls: A Software Review. . *Journal Of Marketing Analytics*, 7(3),. <https://doi.org/10.1057/S41270-019-00058-3>, 196–202.
- Sekaran, U., & Bougie, R. ((2016).). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach. 7th Edition.* New York, Us.: John Wiley & Sons Inc. .
- Suryaningrat, A. M., & Utama, I. M. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 23 No. 1, Februari 2018.*, 129-139.
- Tirta., R. (2021). *Bpk Berikan Opini Wtp Pada Empat Pemerintah Daerah.* Jambi: <https://jambi.bpk.go.id/Bpk-Berikan-Opini-Wtp-Pada-Empat-Pemerintah-Daerah/>.
- Usmar. (2021). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (Survei Pada Pemda Dki Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)*, 50-61.

Wiki, S. (2022). *Kelompok Usia*.
Jakarta:
<https://sepakat.bappenas.go.id/>.
Yafie, M. D. (2013). Penerapan Basis
Akrual Pada Standar Akuntansi

Pemerintahan Indonesia. .
Ejournal.Unesa.Ac.Id. Volume 2
Nomer 1, 40-51.